

## TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK DI KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU

Oleh:

Ahmad Noor Suprayogie<sup>1</sup>, Sidharta Adyatma<sup>2</sup>, Eva Alviawati<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The research entitle "Rate Poverty of Population at Cempaka in Banjarbaru City South Kalimantan". Reasearch to find out rate poverty of population at Cempaka in Banjarbaru city.*

*Population samplein this research were all poor population in Cempaka with total sample 297 householder.This primary was obtained from questionnaires, while secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarbaru City, sub-district office Cempaka, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB) Banjarbaru City, books andjournals related to the research. The analysis used in the reseaech is technique of percentage.*

*The results of this in Sub Palam number of respondents as many as 39 householder, while the level of poverty in Palam Village at most entry Prosperous II as many as 27 householder or (69%). The number of respondents in the Sub Bangkal as many as 69 householder, while the poverty rate in Sub Bangkal most widely entered Prosperous II as many as 51 householder or (74%). The number of respondents in sub Sungai Tiung many as 78 householder, while the poverty rate in Sub Sungai Tiung at most entry Prosperous II as many as 59 householder or (76%).The number of respondents in the subCempaka as many as 111 householder, while the poverty rate in Sub Cempaka at most entry Prosperous II as many as 91 householder or (82%) and poverty in Cempaka largely fit into Prosperous II were distributed into four villages namely Palam Village, Village Bangkal, and Tiung Sungai Cempaka village. The total number of respondents who studied were 297 householder of which 67 householder or (22%) entered Sejahtera I, 228 householder or (77%) entered the Prosperous II and two souls or (1%) entered a prosperous III.*

**Keywords : Level, poverty, Population**

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Bhekti dan Hadi, 2012).

Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah tersebut relatif menurun dari tahun 2003 hingga 2004, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2006. Tahun 2003 persentase jumlah penduduk miskin sebesar 258.960 ribu jiwa (8,16%) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dan menurun menjadi 231.000 ribu jiwa (7,19%) pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 235.700 ribu jiwa (7,23%) tahun 2005 dan 278.451 ribu jiwa (8,32%) tahun 2006, tahun 2007 sampai tahun 2010 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan yaitu 181.963 ribu jiwa (5,21%) di tahun 2010, tahun 2011 meningkat menjadi 194.623 ribu jiwa (5,29%), tahun 2012 turun kembali menjadi 190.597 ribu jiwa (5,01%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru ternyata tidak menurun dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru tahun 2008 sebesar 8.815 jiwa (6,07%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,83 kemudian naik menjadi 10.053 jiwa (5,16%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,91 pada tahun 2009. Jumlah tersebut naik menjadi 11.126 jiwa (5,20%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,95 pada tahun 2010, peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 2012 yaitu 12.021 jiwa (5,98%) dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,18 pada tahun 2012 (Kalimantan Selatan dalam Angka, 2013).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibanding dari sisi kemiskinan, adapun tingkat kemiskinan menurut BKKBN yaitu : keluarga pra sejahtera; keluarga sejahtera I; keluarga sejahtera II; keluarga sejahtera III; dan keluarga sejahtera III plus (BKKBN, 2013).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menyebabkan efek yang hampir sama di setiap negara. Akibat dari gejala sosial tersebut antara lain :

- a. Hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin (sandang, pangan, dan papan).
- b. Tersingkir dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
- c. Kehilangan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, hak untuk berinovasi, dan hak atas kebebasan hidup (Muttaqien, 2006).

Konsep, definisi, dan indikator kemiskinan yang paling umum adalah kurangnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, serta seseorang yang tinggal dalam kawasan kumuhkota (*slum*) dan kawasan perdesaan yang terisolir. Pendapat yang lebih luas adalah bahwa kemiskinan bukan hanya faktor material saja, tapi menyangkut pula faktor sikap, budaya, dan lingkungan (Wahyudi, 2008).

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut

Suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. Kemiskinan Absolut berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa

jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan dengan kata lain, ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal. Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan relatif dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 % atau 10 % masyarakat paling bawah dengan 80 % atau 90 % masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Seseorang digolongkan miskin jika keadaannya menyebabkan seseorang tidak mampu menaati tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan luasnya rentang dimensi dari kemiskinan.

c. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budayawan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi tingkat kemiskinan menjadi 5, adapun tingkat kemiskinan/ kesejahteraan menurut BKKBN yaitu :

- a. Keluarga pra sejahtera, apabila keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin, yaitu belum dapat memenuhi salah satu indikator keluarga sejahtera I
- b. Keluarga sejahtera I, apabila keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin, yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
  - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
  - 2) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
  - 3) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  - 4) Bagian lantai yang terluaskan dari tanah.
  - 5) Anak sakit atau PUS ingin berKB dibawa ke sarana kesehatan.
- c. Keluarga sejahtera II, dengan indikator sebagai berikut :
  - 1) Sudah memenuhi indikator keluarga sejahtera I.
  - 2) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.
  - 3) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/telur/ikan.
  - 4) Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru.
  - 5) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.
  - 6) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
  - 7) Ada seorang anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
  - 8) Anggota keluarga umur 10-16 tahun bisa baca tulis latin.
  - 9) Anak umur 7-15 tahun bersekolah.
  - 10) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai kontrasepsi.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang memenuhi indikator sebagai berikut:
  - 1) Indikator keluarga sejahtera II.
  - 2) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  - 3) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

- 4) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang satu kali dan dimanfaatkan untuk komunikasi.
  - 5) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
  - 6) Keluarga berekreasi diluar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
  - 7) Keluarga memperoleh dari surat kabar /radio/TV/ majalah.
  - 8) Anggota keluarga mampu memanfaatkan sarana transportasi setempat.
- e. Keluarga III plus, yaitu dengan indikator sebagai berikut:
- 1) indikator keluarga sejahtera III.
  - 2) keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
  - 3) ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan yayasan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode diskriptif kuantitatif yang dapat diartikan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dengan memperoleh data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2003).

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang hasilnya dapat berupa persentase selanjutnya akan di hitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Teknik Persentase (%) menurut (Sudijono, 2008) menggunakan rumus yang disajikan sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{N} \times 100\%$$

(Sudijono, 2008)

Keterangan:

- |      |  |
|------|--|
| p    | = angka persentase                           |
| N    | = jumlah frekuensi/banyaknya individu        |
| f    | = frekuensi yang sedang dicari persentasenya |
| 100% | = konstanta                                  |

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kemiskinan penduduk di Kecamatan Cempaka terdistribusi keempat kelurahan yaitu Kelurahan Palam, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Sungai Tiung dan Kelurahan Cempaka.

Tabel 1. Jumlah Tingkat Kemiskinan per Kelurahan di Kecamatan Cempaka

No	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Kelurahan								Total	
		Palam		Bangkal		Sungai Tiung		Cempaka			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pra Sejahtera	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Sejahtera I	12	31%	18	26%	19	24%	18	16%	67	22%
3.	Sejahtera II	27	69%	51	74%	59	76%	91	82%	228	77%
4.	Sejahtera III	0	0%	0	0%	0	0%	2	2%	2	1%
5.	Sejahtera III+	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah		39	100%	69	100%	78	100%	111	100%	297	100%

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang berada pada Sejahtera I sebanyak 12 KK atau (31%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 27 KK atau (69%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Bangkal yang berada pada Sejahtera I sebanyak 18 KK atau (26%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 51 KK atau (74%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Sungai Tiung yang berada pada Sejahtera I sebanyak 19 KK atau (24%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 59 KK atau (76%), sedangkan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Pra Sejahtera, Sejahtera III dan Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera I.

Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Cempaka yang berada pada Sejahtera I sebanyak 18 KK atau (16%) dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera II yaitu sebanyak 91 KK atau (82%), dan tingkat kemiskinan penduduk yang berada pada Sejahtera III sebesar 2 KK atau (2%), sedangkan yang berada pada Pra Sejahtera dan Sejahtera III+ tidak ada atau (0%). Tingkat kemiskinan penduduk di Kelurahan Palam yang paling banyak berada pada sejahtera II dan yang paling sedikit berada pada Sejahtera III.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Tingkat Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dapat disimpulkan bahwa :

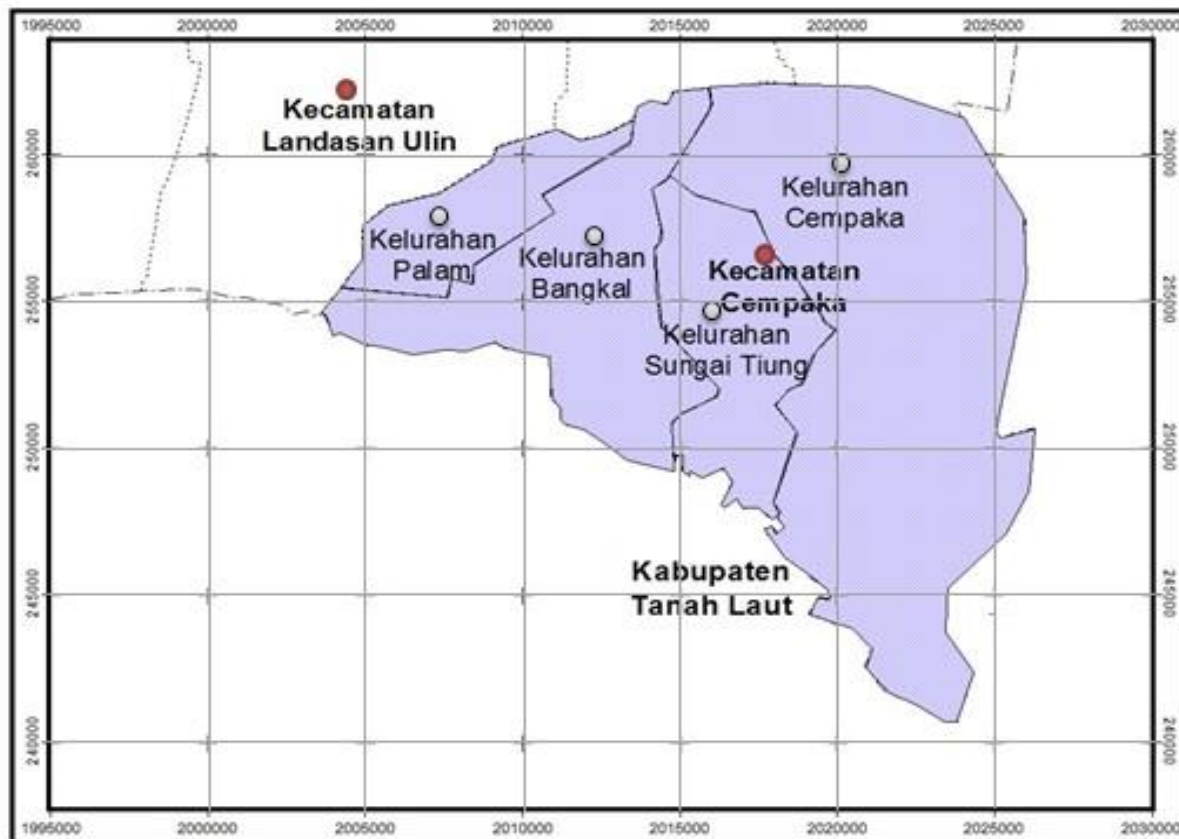
1. Tingkat kemiskinan penduduk di Kecamatan Cempaka sebagian besar masuk Sejahtera II.
2. Tingkat kemiskinan penduduk berdasarkan per Kelurahan di Kecamatan Cempaka yaitu Kelurahan Palam paling banyak masuk Sejahtera I diantara 3 Kelurahan lainnya, sedangkan yang masuk Sejahtera II paling banyak berada di Kelurahan Cempaka diantara 3 Kelurahan lainnya. Tingkat kemiskinan dari keempat kelurahan yang ada di Kecamatan Cempaka hampir tidak ada yang masuk Pra Sejahtera, Sejahtera III dan Sejahtera III+.

## DAFTAR PUSTAKA

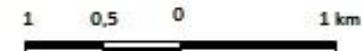
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2013. Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Miskin. Jurnal Online (www.Bkkbn.go.id, diakses pada 06 Maret 2015).
- Bhekti & Hadi. 2012. Analisis Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga, Faktor Komunitas Dan Karakteristik Wilayah Di Kecamatan Gunungpati Semarang, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-6 (<http://ejournal-s1.undip.ac.id>, diakses 2 Maret 2015).
- Criswardani Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. ([http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 08 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%2008%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 11 Mei 2015).
- Muttaqien, A. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera : Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.



## PETA TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK KECAMATAN CEMPAKA



Skala peta 1 : 50.000



### Legenda

- Kecamatan
- Kelurahan
- Batas kota/Kota
- ..... Batas kecamatan
- Batas kelurahan
- Tingkat Kemiskinan
- Pra Sejahtera (PS)
- Sejahtera I (SI)
- Sejahtera II (SII)
- Sejahtera III (SIII)
- Sejahtera III Plus (SIII+)



Oleh :  
Ahmad Noor Suprayogie  
A1A511055

Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin  
2015

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru